



RENCANA KERJA TAHUN 2022



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana**

Provinsi Kalimantan Tengah

JL. M.H THAMRIN NO.11 TELP/FAX (0536) 3224547, PALANGKA RAYA

73112

KALIMANTAN TENGAH

Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya, sehingga Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik.

Rencana Kerja (RENJA) DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah merupakan acuan kerja dalam melaksanakan kegiatan tahunan. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 ini mengacu pada rencana pelaksanaan program kegiatan yang tetuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2022–2026 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) disusun dengan memperhatikan kewenangan institusi serta perkembangan yang ada dilingkungan internal dan eksternal, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan organisasi lebih lanjut guna mendukung pembangunan daerah, harapan yang lebih luas semoga kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 19 Agustus 2021

PLT KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



dr. LINAE VICTORIA ADEN, M. M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19680717 199903 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan capaian Renstra PD	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi PD	26
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	33
2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	39
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	44
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	69
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	74
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	74
3.1.1 Kebijakan Kementerian PPPA.....	74
3.1.2 Kebijakan Keluarga Berencana Nasional	79
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD Tahun 2022 PD	91
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	95
4.1 Program dan Kegiatan	95
BAB V PENUTUP.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. proses Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 terdiri dari 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan akhir, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan renja.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja PD Tahun 2022 sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan PD DP3APPKB untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Kerja Tahun 2022 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja Tahun 2022 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun menjabarkan tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan serta arah pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2022–2026.

Rencana Kerja Tahun 2022 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun berfungsi menterjemahkan, mengoperasikan RKPD ke dalam program dan kegiatan PD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan

capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RENSTRA 2022-2026 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR

188.44/273/2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan “Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan”;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan dan Perubahan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90);
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;

- u. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah;
- ll. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah; nn. Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Tengah; pp. Biro Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- rr. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 yang telah ditetapkan, menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juli 2021



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan;
c. Asisten Administrasi Umum; dan
d. Kepala Biro Hukum.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
5. Masing-masing Kepala Perangkat Daerah untuk diketahui.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Tahun 2022 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun dengan maksud :

1. Menjabarkan rencana strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026 dikaitkan dengan hasil kajian isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Tahun 2021.
2. Menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2022.
3. Mengukur kinerja pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA Tahun 2022 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
2. Mengetahui tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2022;
4. Menyediakan dokumen untuk perwujudan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah disusun dalam sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun lalu dan capaian Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan PD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, Review terhadap rancangan akhir RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran RENJA PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, serta tabel rencana program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

Berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan capaian Renstra PD

Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 DP3APPKB disusun berdasarkan analisa kondisi objektif permasalahan pembangunan saat ini, analisa kondisi objektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi PD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi perangkat daerah saat ini serta estimasi kondisi yang akan datang.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian pada tahun berjalan pada bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk evaluasi program dan kegiatan tahun 2022. Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RENJA Tahun 2021 DP3APPKB dijabarkan pada ***tabel 2.1***

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021

Provinsi Kalimantan Tengah

PD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Terget Capaian Kinerja RPMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan	
						Target RKPD Tahun 2019 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2019 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)										
2.02	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
2.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
2.02 . 01.001	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan	12 bulan	60	100	12	12	100	12	12	100
2.02 . 01.002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan	12 bulan	60	100	12	12	100	12	12	100
2.02 . 01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bulan	12 Bulan	60	100	12	12	100	12	12	100
2.02 . 01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Bulan	12 Bulan	60	100	12	12	100	12	12	100
2.02 . 01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan	12 Bulan	60	100	12	12	100	12	12	100
2.02 . 01.009	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Bulan	12 Bulan	60	100	12	12	100	12	12	100
2.02 . 01.010	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan		60	100	12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan	
						Target RKPD Tahun 2019 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2019 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02 . 01.011	Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan biaya cetak dan penggandaan	Bulan	60	100	12	12	100	12	12	100
2.02 . 01.012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan	12 Bulan	60	100	12	12	100	12	12	100
2.02 . 01.013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket	1 Paket	2	100	1	2	200		2	100
2.02 . 01.015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	bulan	60	100	12	12	100	12	12	100
2.02 . 01.017	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan	12 Bulan	60	100	12	12	100	12	12	100
2.02 . 01.018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas / koordinasi ke luar daerah	Bulan	60	100	12	12	100	12	12	100
2.02 . 01.019	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas / koordinasi ke dalam daerah	Bulan	60	100	12	12	100	12	12	100
2.02 . 01.070	Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak	Jumlah bulan	12	12					12	12	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan	
						Target RKPD Tahun 2019 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2019 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah paket pengadaan / unit	unit	1		1	1	100			33,33
		Jumlah paket pengadaan / unit	Unit	1		1	1	100			33,33
		Jumlah Unit	Unit	2		2	2	100			33,33
2.02 . 02.010	Pengadaan Meubelair	Jumlah paket pengadaan meubelair kantor	Paket	1		1	1	100			33,33
2.02 . 02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah unit pemeliharaan	Unit	5	100	1	1	100	1	1	100
2.02 . 02.031	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir	jumlah unit pemeliharaan	Unit	4	100	1	1	100	1	1	100
2.02 . 02.194	Penataan Taman dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura	Jumlah Lokasi penataan halaman dan kebun hortikultura	Lokasi	3		1	1	100	1	1	66,67
		Jumlah pakaian olahraga / orang	Stel	78		78	78	100			33,33
		Jumlah pakaian dinas / orang	Stel	156	100	78	78	100			66,67
2.02 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
2.02 . 05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Penyediaan dana	Bulan	39	100	12	12	100	3	12	200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan	
						Target RKPD Tahun 2019 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2019 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		pelatihan dan diklat bagi aparatur									
2.02 . 05.036	Rapat koordinasi perencanaan	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan dalam 1 tahun	Kali	6		4			2	2	33,33
2.02 . 05.149	Peningkatan Kapasitas Sistem Perencanaan	Jumlah	Dokumen	1					1	1	33,33
2.02 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
2.02 . 06.001	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang tersusun	Dokumen	5	100	1	1	100	1	1	100
2.02 . 06.003	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah	Bulan	12					12	12	33,33
2.02 . 06.004	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	5	100	1	1	100	1	1	100
2.02 . 06.006	Penyusunan RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang tersusun	Dokumen	10	100	2	2	100	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan	
						Target RKPD Tahun 2019 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2019 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02 . 06.011	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Bulan	Bulan	36		12	12	100	12		33,33
2.02 . 06.015	Penyusunan renja SKPD	jumlah dokumen Renja PD yang tersusun	Dokumen	10	100	2	2	100	2	2	100
2.02 . 06.055	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah	Dokumen	1					1	1	33,33
2.02 . 06.063	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	Dokumen	1		1	1	100		1	33,33
2.02 . 08	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah										
2.02 . 08.001	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan aset/ barang milik daerah	Bulan	60	100	12	12	100	12	12	100
2.02 . 15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan										
2.02 . 15.005	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah rapat koordinasi	Kegiatan	14	100	3	3	100	2	2	100
2.02 . 15.010	Rakor Pokja PUG dan Tim Teknis ARG Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen	Dokumen	3		1	1	100	1		33,33
		Jumlah Dokumen	Dokumen	1		1	1	100			33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan	
						Target RKPD Tahun 2019 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2019 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Hasil Rapat Koordinasi									
2.02 . 15.020	Rapat Koordinasi Gugus Tugas PHA Tingkat Provinsi										
2.02 . 15.024	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi	Dokumen	4	100	1	1	100	1	1	100
2.02 . 15.025	Rakornas Forum Anak Nasional	Jumlah dokumen rakornas forum anak tingkat nasional	Dokumen	4	100	1	1	100	1		66,67
2.02 . 15.029	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	Jumlah dokumen monev	Dokumen	5	100	1			1		33,33
2.02 . 15.030	Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi, Kabupaten dan Kota	Jumlah dokumen rapat koordinasi pokjatap GSI	Dokumen	3		1	1	100	1	1	66,67
		Jumlah Peserta	Orang	150		50	50	100	50	50	66,67
2.02 . 15.031	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	Jumlah Dokumen rapat koordinasi	Dokumen	3		1			1		
2.02 . 15.040	Monev PUG di Daerah	Jumlah Dokumen Monev	Dokumen	4	100	1	1	100	1	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan	
						Target RKPD Tahun 2019 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2019 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1		1					
2.02 . 15.044	Rapat Forum Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)										
2.02 . 15.045	Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD) PPA Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah bulan pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Bulan	12					12	12	33,33
2.02 . 15.046	Rapat Koordinasi Tim Lembaga Perlindungan Perempuan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah	Jumlah rapat kordinasi dilaksanakan		1					1	1	33,33
2.02 . 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak										
2.02 . 16.033	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Jumlah Dokumen	Dokumen	6	100	1	1	100	2	2	100
2.02 . 16.042	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	Jumlah Dokumen pemantauan dan koordinasi Jejaring Kelembagaan	Dokumen	5	100	1			1		33,33
2.02 . 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan										

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan	
						Target RKPD Tahun 2019 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2019 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02 . 17.026	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	22	100	5	5	100	2	2	100
		Jumlah Peserta	Orang	150		50	50	100	50		33,33
		Jumlah Kegiatan	Kegiatan	6		2	2	100	2		33,33
		Jumlah Dokumen	Dokumen	5	100	1	1	100	1		66,67
		Jumlah Peserta	Orang	150	100	100	100	100			66,67
2.02 . 17.042	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah/Frekuensi Kegiatan Promosi	Kegiatan	5		4	4	100	1	1	66,67
2.02 . 17.043	Pembinaan Terhadap Posyandu Melalui Penguatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	Jumlah Kegiatan pembinaan	Kegiatan	3		1	1	100	1		33,33
2.02 . 18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan										
2.02 . 18.007	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	7	100	2	2	100	1	1	100
2.02 . 18.025	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Jumlah Dokumen promosi	Dokumen	5	100	1	1	100	1	1	100
2.02 . 18.026	Capacity Building Bagi Perempuan	Jumlah Peserta	Orang	200	100	50	50	100	50		66,67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan	
						Target RKPD Tahun 2019 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2019 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02 . 18.027	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	Jumlah Peserta	Orang	120	100	30	30	100	30	30	100
2.02 . 20	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen	Dokumen	1		1	1	100			33,33
2.02 . 20.023	Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	Jumlah Dokumen Monev	Dokumen	3		1	1	100	1	1	66,67
2.02 . 20.024	Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	Jumlah Dokumen	Dokumen	3		1	1	100	1	1	66,67
2.02 . 20.026	Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)										
2.02 . 21	Program Penyusunan Profil Lembaga										
2.02 . 21.009	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Aplikasi	Aplikasi	6		2	2	100	2	2	66,67
2.02 . 21.010	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	Jumlah Dokumen	Dokumen	3		1	1	100	1		33,33
2.02 . 21.012	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Jumlah bulan	Bulan	36		12	12	100	12		33,33
		Jumlah Bulan	Bulan	12		12	12	100			33,33
2.02 . 21.022	Pengembangan Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah pengembangan layanan keterbukaan informasi publik	Dokumen	1					1	1	33,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Capaian Kinerja RPMD Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD tahun berjalan (tahun n-1) 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD sampai dengan tahun berjalan	
						Target RKPD Tahun 2019 (tahun n-2)	Realisasi RKPD tahun 2019 (tahun n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.08	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
2.08 . 15	Program Keluarga Berencana										
2.08 . 15.002	Pelayanan KIE	Jumlah Peserta KB	orang	500	100	100	100	100	100		66,67
		Jumlah Peserta	Orang	30		30	30	100			33,33
2.08 . 15.025	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	orang	515		65	65	100	200	200	66,67
2.08 . 15.029	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen	Dokumen	5	100	1	1	100	1	1	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, maupun terhadap IKK yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya diterangkan jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk menganalisa kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah digunakan beberapa indikator, antara lain mengacu pada SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dengan sasaran target sesuai dengan renstra SKPD dan/atau berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan. Kinerja pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan indikator kinerja antara lain :

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan dalam lingkup Pengarusutamaan Gender (PUG)
 - a) Kebijakan berupa Peraturan Daerah
 - b) Penguatan Kapasitas Jaringan Pengarusutamaan Gender melalui Sosialisasi PUG mengenai konsep gender, kesetaraan dan keadilan gender (KKG), Anggaran Responsif Gender (ARG), Pelatihan Fasilitator PUG dan Pelatihan Pendampingan dan Advokasi Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Pendampingan dan konsultasi penyusunan Renstra/Renja SKPD yang responsif gender.
 - c) Ketersediaan data gender dan anak.
 - d) Kemitraan dan jaringan antara organisasi yang ada di dalam dan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
 - e) Integrasi pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan utama pembangunan, sebagaimana arah kebijakan pembangunan nasional agar pembangunan yang dilaksanakan di tiap sektor dapat saling berkorelasi dan memberikan manfaat sosial kepada masyarakat (laki-laki maupun perempuan) dengan memperhatikan aspek kesetaraan, keadilan dan keberlanjutan.
2. Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - a) Upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan kepada perempuan dan anak yang bersifat pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan berupa Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan. Peraturan daerah ini bersifat spesifik hanya memberikan perlindungan kepada Perempuan dan anak korban dan Gugus Tugas Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- b) Upaya pengembangan lembaga layanan melalui penguatan dan peningkatan kapasitas jaringan serta peningkatan sumber daya manusia yang terlatih melalui berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menangani upaya pencegahan dan tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Dengan didukung alokasi anggaran dari pemerintah daerah, masyarakat dan peran serta dunia usaha secara terus menerus dan berkelanjutan.
 - c) Data terkait tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak disediakan oleh lembaga layanan perempuan dan anak berupa UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dan yang selanjutnya diformulasikan oleh DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilaporkan setiap tahunnya.
 - d) Lembaga layanan untuk perlindungan perempuan dan pemenuhan haknya diantaranya adalah UPT PPA, LSM pemerhati perempuan dan berbagai panti sosial dan pusat rehabilitasi milik Instansi Vertikal.
 - e) Kebijakan Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak antara lain dengan adanya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak diharapkan mampu menjadi pijakan dalam rangka memperkuat komitmen dan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak
3. Pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a) Program Keluarga Berencana bertujuan menurunkan laju pertumbuhan penduduk yang dilakukan antara lain melalui pengendalian kelahiran. Adapun kegiatan tersebut yaitu Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB Nasional. Kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program KB Nasional ditujukan untuk meningkatkan KIE Program KB.
 - b) Kegiatan meningkatkan kemandirian dan kualitas keluarga di masyarakat dalam melaksanakan program KB dan meningkatkan keluarga bahagia dan sejahtera.
 - c) Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB yang telah dilaksanakan adalah kegiatan khusus seperti Hari Keluarga Nasional (Harganas).

Pencapaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **tabel 2.2** sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Tengah

NO	Indikator	Target SPM / Standar Nasional	Target IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
11.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)		12,30	10,88	11,36	11,83	12,30	6,50	6,34	6,34	12,30	
11.2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)		29,62	23,59	25,60	27,61	29,62	88,76	80,85	80,85	29,62	
11.3	Rasio KDRT		0,012	0,0213	0,0182	0,0151	0,012	0,0088	11,25	8,5097	0,012	
11.4	Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur (%)		0,00	0,23	0,15	0,08	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00	
11.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)		57,18	54,09	55,12	56,15	57,18	53,61	56,60	56,60	57,18	
11.6	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)		100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100	
11.7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		80,22	78,57	79,31	79,67	81,88	77,87	77,03*	83,20	81,88	
11.8	Indek Pembangunan Gender (IPG)		90,00	89,54	89,67	89,88	91,34	89,25	89,13*	89,09	91,34	
12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera											
12.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga		1,50	1,20	1,30	1,40	1,50	0,58	2,29	2,24	0,58	
12.2	Rasio akseptor KB		83,29	80,60	81,49	82,39	83,29	79,21	77,44	79,85	79,21	
12.3	Cakupan peserta KB aktif (Orang)		425.000	394.756	403.585	412.413	425.000	373.140	354.667	398.563	373.140	
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I		148.072	164.891	159.285	153.678	148.072	243.211	239.863	239.740	239.740	

Keterangan :

*Data *update* di akhir tahun 2020

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.
4. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan Pemberdayaan Perempuan.
5. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
6. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
7. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
8. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

9. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
10. perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
11. pengelolaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya ;
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. penetapan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) skala provinsi ;
2. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi ;
3. penyelenggaraan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan skala provinsi ;
4. fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, tenaga kerja, perempuan lansia, perempuan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik skala provinsi ;
5. penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
6. fasilitasi pengembangan dan penguatan lembaga atau organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi ;
7. koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi;
8. kompilasi data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi menyangkut komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
9. penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi dan Anak skala provinsi ;
10. penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi ;
11. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi ;

12. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi ;
13. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) skala provinsi ;
14. penetapan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga berencana ;
15. pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan penduduk (aspek kualitas, kuantitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan; dan
16. penyerasian kebijakan kependudukan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 2 (dua) hal yang menjadi perhatian, antara lain :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Sampai dengan tahun 2019 belum tersedia data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga data yang akurat, cepat dan periodik mengenai korban kekerasan belum dapat terlaksana dengan baik. Demikian pula kasus tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat

2. Perlakuan Diskriminatif Tenaga kerja perempuan

Tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal jenisnya sangat luas dan kondisinya dinamis, serta belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak terorganisir, jaminan kesehatan akibat kerja adalah menjadi tanggungan pribadi tenaga kerja perempuan. Sedangkan yang bekerja di perusahaan, tenaga kerja perempuan masih sering dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak

menentu, kesempatan karir, dan lain-lain. Kerugian lain yakni dari pemotongan pajak lebih besar dari pada tenaga kerja laki-laki, karena perempuan dianggap berstatus lajang.

3. Rendahnya Peran Perempuan di Sektor Politik dan pengambilan keputusan
Perlunya peran perempuan dan upaya memperkuat Kelembagaan, Pengarusutamaan Gender didalam pembangunan : Masih rendahnya akses perempuan terhadap pembangunan di sektor publik maupun jabatan-jabatan politik. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya

4. Produktivitas Ekonomi Perempuan Belum Optimal

Di bidang ekonomi, dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan gender. Penurunan tingkat kemiskinan untuk rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki (RTM-L).

Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki, walaupun demikian angka TPAK perempuan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Kenaikan TPAK perempuan tidak diikuti oleh peningkatan peluang kerja yang baik bagi mereka, sehingga menyebabkan produktivitas ekonomi perempuan belum optimal. Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu, pertama, masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah); dan kedua, lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang bergaji rendah. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dengan keahlian, keterampilan dan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki dan mereka juga mengalami perlindungan yang kurang optimal. Perlunya program perempuan pengembang ekonomi lokal melalui pemberdayaan ekonomi perempuan dan juga perlunya program peningkatan peran perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga.

5. Kelembagaan Pengarusutamaan gender yang belum maksimal

Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan antara lain terlihat dari: 1) Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan; 2) Belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan 3) Masih rendahnya

pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan, terutama di kabupaten/kota

6. Permasalahan Pembangunan Perlindungan Anak

a. Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi

Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es. Jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya

b. Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum ditangani dengan baik

Pengetahuan yang terbatas dari keluarga/orangtua yang memiliki ABK menyebabkan keluarga/orangtua malu dan menyembunyikan/ menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Di samping itu, jumlah guru di sekolah-sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas sehingga banyak yang tidak dapat bersekolah di sekolah umum

c. Permasalahan sosial anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain anak yang mengalami eksploitasi ekonomi (pekerja anak), anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, anak dalam keadaan darurat (konflik, bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/AIDs, perkawinan usia anak dan anak di daerah minoritas/terisolasi. Masalah sosial yang dialami anak pada umumnya berasal dari keluarga yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik

d. Pada anak yang berhadapan dengan hukum, di seluruh institusi atau tingkat peradilan, aparat penegak hukum (APH) memperlakukan anak seperti orang dewasa

e. Belum semua program dan kegiatan pembangunan baik di K/L dan Pemda selaras dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA), masih bersifat parsial, belum holistik dan terintegratif. Hal ini terlihat dari: 1) Meningkatnya prevalensi kekerasan pada anak; 2) Masih terdapat disharmoni antar perundang-undangan/ kebijakan terkait perlindungan anak dan belum lengkapnya aturan pelaksanaan suatu undang-undang; serta 3) Masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada.

f. Masih tingginya angka usia pernikahan anak, terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak, dan masih

banyaknya anak terlantar tanpa adanya pengasuhan orang tua atau orang tua pengganti, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua dalam memberikan pengasuhan berkualitas kepada anaknya melalui pemenuhan hak anak dengan kasih sayang tanpa kekerasan.

- g. Masih tingginya angka *drop-out* sekolah, masih rendahnya angka partisipasi sekolah, belum optimalnya kualitas pendidikan baik dilihat dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, masih tingginya kekerasan terhadap anak di sekolah, masih sedikitnya sekolah yang menuju Sekolah Ramah Anak (SRA), belum tersedianya Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS), terbatasnya ruang kreativitas anak di luar sekolah, terbatasnya ruang bermain ramah anak, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua akan pentingnya pemenuhan hak anak untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri anak. Demikian pula dengan negara, masyarakat dan dunia usaha belum optimal untuk mewujudkan hak anak untuk memanfaatkan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya secara optimal. Selain itu, juga belum tersedia panduan bagi semua individu yang bekerja dengan anak dalam ranah bermain dan rekreasi yang ramah anak.
 - h. Masih sedikitnya jumlah puskesmas yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak (PRA).
 - i. perlunya penguatan Forum anak/kelompok anak di tingkat Kabupaten karena belum semua kabupaten/kota memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak.
 - j. perlunya peningkatan kualitas hidup anak melalui fasilitasi kebijakan Kabupaten Layak Anak karena belum semua kabupaten/kota menginisiasi menuju KLA.
 - k. perlunya pengembangan Materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - l. perlunya sinkronisasi program dan kegiatan lintas SKPD.
7. Permasalahan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program
 - b. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak

- c. Belum maksimalnya pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Belum efektifnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat
- e. Belum maksimalnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
- f. Belum optimalnya penelaahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam hal ini yang menjadi permasalahan mendasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan Keluarga Berencana adalah belum adanya pembagian kewenangan yang jelas antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan urusan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Tengah. Walaupun dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah mengamanatkan bahwa pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, Provinsi dan Kabupaten/kota. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang ini diharapkan semakin mendorong dan memperkuat BKKBD di Kabupaten/kota sebagaimana yang juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Terlepas dari hal tersebut diatas, permasalahan yang masih terdapat dalam pelaksanaan program keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Aspek kependudukan belum menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
2. Metode fasilitasi dan mekanisme operasional di lapangan dalam pelaksanaan Program KB belum optimal.
3. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan operasional, pembinaan dan pergerakan.
4. Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus dikembangkan.

5. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam mendukung kegiatan.
5. Tingginya penggunaan alat kontrasepsi non MKJP.
6. Tingginya angka kehamilan/kelahiran pada usia remaja (15-19 tahun).
7. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah.
8. Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja;
9. Masih tingginya jumlah keluarga miskin;
10. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
11. Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB.
12. Belum seluruh kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang Pengendalian Penduduk dan Kb dimasukkan dalam perencanaan daerah;
13. Penguatan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Tingkat Provinsi dan Kab/Kota;

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

Pengukuran tingkat capaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 dengan realisasinya.

Secara umum sasaran strategis yang ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat beberapa sasaran strategis yang belum mencapai target yang ditetapkan. Terhadap sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan akan dianalisis dan dievaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Tingkat capaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Tingkat capaian kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
tahun 2020

No	Sasaran	Tingkat Capaian
1	Meningkatnya Implementasi Pengarustamaan Gender	32,33
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan public dan pendapatan keluarga	100
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	99,85
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	100
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	100
6	Meningkatnya kualitas perlindungan khusus kepada anak	100
7	Meningkatnya kualitas data terpilah gender dan anak	83,34
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	100
9	Menurunnya angka kelahiran	97,76
10	Meningkatnya akseptor KB	100
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	90,58
Rata-rata persentase Capaian Sasaran		91,26 %

Tingkat capaian indikator kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Tingkat capaian indikator kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	2020		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	3,00	0,97	32,33
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislative	persen	28,89	31,58	100
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	persen	33,41	33,36	99,85
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Rasio	0,0182	8,5097	100
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	persen	25	100	100
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	persen	35,71	0	0
		Rasio anak korban kekerasan	Rasio	0,0182	1,0083	100
6	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	persen	100	100	100
7	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	persen	13,33	11,11	83,34
8	Meningkatnya koordinasi	Hasil Penilaian SAKIP	Skor	B+	BB	100

No	Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	2020		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran					
9	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,26	2,24	97,76
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	Anak	1	1	100
10	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	rasio	0,829	0,7985	90,58
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	17,02	11,31	50,66

Dalam rangka melaksanakan pelayanan kinerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Susunan Organisasinya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

Kepala Dinas , membawahi 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Bidang.

a. Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Sub Bagian :

- Sub Bagian Penyusunan Program;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Bidang Kesetaraan Gender, membawahi 3 (tiga) Seksi :

- Seksi Pemantapan Kelembagaan PUG;
- Seksi Pemantauan dan Evaluasi PUG;
- Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan.

c. Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat , membawahi 3 (tiga) Seksi:

- Seksi Data;
- Seksi Penyebarluasan Informasi;
- Seksi Partisipasi Masyarakat.

d. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, membawahi 3 (tiga) Seksi :

- Seksi Tumbuh Kembang Anak;
- Seksi Perlindungan Anak;
- Seksi Pemantapan Lembaga Layanan Anak.

e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, membawahi 3 (tiga) Seksi :

- Seksi Perlindungan Perempuan
- Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga;
- Seksi Standarisasi Lembaga Layanan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

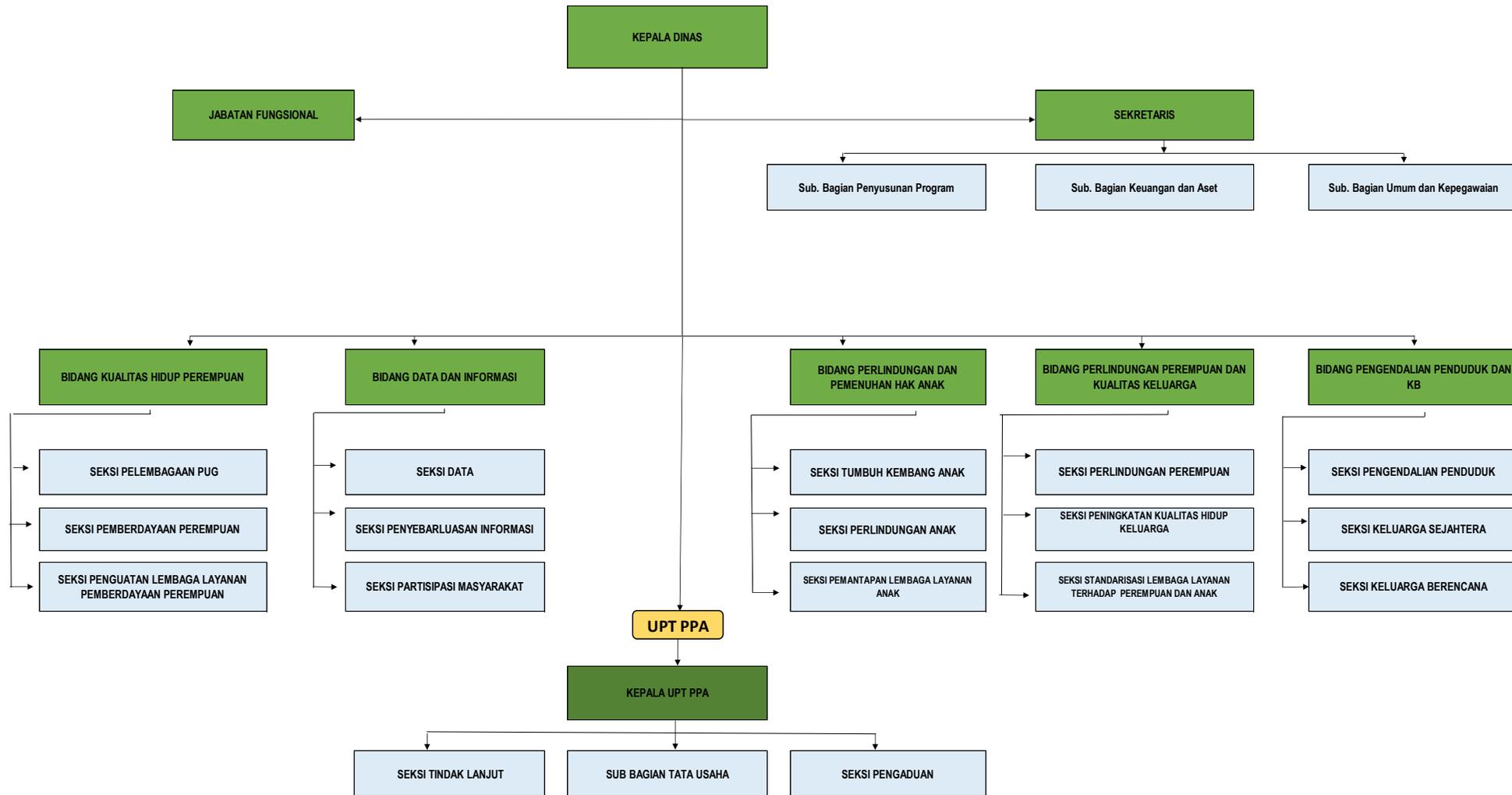
f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi 3 (tiga) Seksi :

- Seksi Pengendalian Penduduk;
- Seksi Kesehatan Reproduksi;
- Seksi Keluarga Berencana.

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.20 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak , dengan klasifikasi A , dengan susunan sebagai berikut :

- UPT –PPA adalah unsur pelaksana teknis yang berada di baah dan bertanggung jab kepada Kepala Dinas
- Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pengaduan
- Seksi Tindak Lanjt Kasus
- Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

A. Permasalahan pelaksanaan tugas dan fungsi

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- Masih banyaknya kebijakan operasional pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak dan keluarga berencana yang masih perlu ditelaah dan disinergikan;
- Masih kurangnya pedoman dan petunjuk teknis bidang pemberdayaan perempuan, anak, ketahanan keluarga, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
- Masih lemahnya koordinasi baik lintas sektor maupun lintas program dalam rangka pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;
- Masih lemahnya pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana yang mencakup pemberdayaan, kesetaraan, kualitas hidup, perlindungan kadilam dan hak asasi serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
- Kurangnya fasilitas kerja sehingga pekerjaan yang penting sering tidak bisa dikerjakan dengan cepat bahkan terlambat, sehingga dapat menghambat persiapan maupun pelaksanaan kegiatan;
- Perlunya menanamkan persepsi masyarakat tentang Pengarusutamaan gender, Perlindungan Terhadap perempuan dan anak perlindungan melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan dan pembinaan secara teratur sehingga masyarakat sadar akan pentingnya hal tersebut dalam aspek kehidupan terutam pembangunan yang berkeadilan. Oleh karena itu secara khusus Bidang PUG, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar dapat terus berinovasi untuk membuat perencanaan program kegiatan .

B. Hambatan pelaksanaan tugas dan fungsi

- Koordinasi yang masih fersial sehingga menghambat dalam proses pelayan publik;
- Tingkat pemahaman aparaturnya pelaksanaan pelayanan terhadap tugas dan fungsi belum maksimal;
- Inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan tidak berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kepedulian terhadap tugas dan tanggung jawab pelaksanaan tugas yang belum terwujud dengan baik;
- Kurangnya koordinasi dan kerjasama secara internal sehingga beberapa pekerjaan menyangkut data yang berhubungan dengan masing-masing tupoksi tidak bisa dikerjakan dengan cepat;
- Penempatan Pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya;
- Kurangnya pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

C. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

- Tanggung jawab terhadap kemajuan daerah melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan mengalami proses yang panjang untuk terlaksana.
- Upaya pengawasan terhadap persaingan bebas yang berbasis ekonomi kerakyatan perlu peningkatan
- Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal balik pemerintah dan masyarakat belum maksimal dikarenakan hal ini sangat menentukan penilaian masyarakat tentang pelayanan dari aparaturnya negara dan keberhasilan Kepala Daerah khususnya.

D. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Tantangan

- Dengan adanya Kesenjangan/Ketidaksetaraan sangat penting untuk melakukan review peraturan perundang-undangan agar tidak bias gender dan tidak diskriminasi
- Konflik peran sangat mempengaruhi strategi perlindungan perempuan dan anak
- Disparitas Indeks Pembangunan Gender antar wilayah yang menunjukkan angka yang bervariasi, namun antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah hal itu belum maksimal digambarkan/dipetakan.
- Masih tingginya angka kemiskinan merupakan tantangan tersendiri bagi peningkatan IPG

- Meningkatnya kasus kekerasan pada Anak dan Perempuan
- Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi dalam politik masih belum maksimal, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di berbagai level
- Masih rendahnya keterlibatan lintas sektor dalam Pengarus Utama Gender (PUG)
- Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi
- Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja
- Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah
- Meningkatnya keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
- Kemandirian ekonomi untuk KB bagi anggota UPPKS di Kabupaten/Kota belum tampak
- Belum optimalnya institusi-institusi masyarakat dalam melaksanakan program KB

Peluang

- Menguatnya isu Gender
- Banyaknya dukungan dari masyarakat terhadap program PUG dan PUHA
- Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang mendorong banyaknya SDM Perempuan yang potensial
- Tersedianya Organisasi-organisasi yang peduli akan pemberdayaan perempuan
- Dibentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai tempat pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan Anak di Kalimantan Tengah
- Banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, yang memiliki perhatian terhadap masalah perlindungan perempuan dan anak serta remaja
- Adanya peraturan perundang-undangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah

- Dukungan Pemerintah Daerah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
- Kemajuan teknologi informasi
- Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung keluarga berencana
- Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi.
- Banyaknya lembaga organisasi masyarakat yang peduli terhadap keluarga berencana untuk meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
- Kemudahan informasi tentang KB
- Animo masyarakat untuk ber KB cukup tinggi
- Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007

Kekuatan

- Adanya regulasi yang mendukung kegiatan di DP3APP-KB (SOP, SPM, Perda, Pergub dll)
- Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal
- SDM dari latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja
- Tersedianya dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan
- Terbentuknya jejaring kelembagaan
- Koordinasi yang baik dengan Kabupaten/kota dan SKPD terkait
- Dukungan lintas Sektor yang terkait dalam perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Tengah
- Terbentuknya UPT Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah

Kelemahan

- Kurang optimalnya sarana dan prasarana
- koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan SKPD terkait masih belum optimal
- *Reward and Punishment* belum berjalan optimal
- Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif

- Kreativitas dan inovasi Program/Kegiatan yang kurang optimal
- Kualitas dan kompetensi SDM belum optimal
- Anggaran masih terbatas
- Tupoksi masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal
- Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan
- Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender
- Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan

E. Isu-isu strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Tengah lima tahun ke depan, meliputi :

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :
 - a. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
 - b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO
 - c. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
2. Perlindungan Anak :
 - a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
 - b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya
 - c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak
 - d. Pekainan Usia Anak tertinggi no 2 di Indonesia

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder pelaksana kebijakan KB KS di Provinsi Kalimantan Tengah terutama sinkronisasi data pelaksanaan KB di Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan kependudukan dan KB melalui sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat
3. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk program KB melalui APBD
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat terutama PUS untuk menjadi akseptor KB
5. Meningkatkan layanan terhadap permasalahan kesehatan reproduksi perempuan dan remaja
6. Meningkatkan fungsi keluarga sebagai institusi penindung anak-anak untuk berkembang

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah tahapan pertama dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

RKPD memuat evaluasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan evaluasi RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD pada dasarnya berfungsi sebagai penjabaran RPJMD. Dengan demikian, penyusunan RKPD berpedoman kepada RPJMD, namun tetap mempertimbangkan dinamika permasalahan dan isu-isu pembangunan mutakhir. Capaian kinerja RKPD selama 5 (lima) tahun harus dapat menjawab dan mencapai visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMD.

RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang telah ditetapkan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan mengacu pada arah pembangunan tahunan 2016-2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018. Disatu sisi, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah 2020 ini memperhatikan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019. RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan mengacu kepada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Renstra DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah maka DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan memperhatikan kepada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dalam melaksanakan review rancangan akhir RKPD proses yang dilakukan adalah membandingkan antara rancangan akhir RKPD tahun 2020 dengan hasil analisis kebutuhan banyak terdapat perbedaan antara lain :

- Tidak semua kegiatan yang ada dalam rancangan akhir RKPD dapat dilaksanakan
- Terdapat beberapa indikator kinerja yang harus disesuaikan
- Besarnya dana dalam rancangan akhir RKPD
- *Adanya program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rencana Akhir RKPD**

Untuk lebih jelasnya review rancangan RKPD tahun 2020 terhadap hasil analisa kebutuhan pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada **Tabel 2.5** sebagai berikut :

Tabel 2.5
Review terhadap rancangan akhir RKPD tahun 2020
Provinsi Kalimantan Tengah

PD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2,428,675,000.00	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2,862,377,000	
	Penyediaan jasa surat menyurat	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan penyediaan layanan jasa surat menyurat	12 Bulan	7,000,000.00	Penyediaan jasa surat menyurat	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	7,000,000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan penyediaan layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	148,816,000.00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	148,816,000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah bulan penyediaan biaya /jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	130,946,000.00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	130,946,000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan penyediaan layanan jasa administrasi	12 Bulan	906,674,000.00	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	906,674,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			keuangan bagi aparat								
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan penyediaan layanan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	34,156,000.00	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	34,156,000	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan penyediaan biaya /jasa perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	20,000,000.00	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	20,000,000	
	Penyediaan alat tulis kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	50,000,000.00	Penyediaan alat tulis kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 bulan	50,000,000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan penyediaan biaya cetak dan penggandaan	12 Bulan	45,000,000.00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	45,000,000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah bulan penyediaan komponen listrik kantor	12 bulan	50,000,000.00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 bulan	50,000,000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	196,130,000.00	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Palangka Raya	jumlah paket	1 Paket	396,130,000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 bulan	91,780,000.00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 bulan	91,780,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan makanan dan minuman	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah bulan peyediaan makanan dan minuman bagi aparatur	12 Bulan	30,000,000.00	Penyediaan makanan dan minuman	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	30,000,000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	LUAR PROVINSI	jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas / koordinasi ke luar daerah	12 Bulan	406,298,000.00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah bulan	12 Bulan	640,000,000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas / koordinasi ke dalam daerah	12 Bulan	311,875,000.00	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah bulan	12 Bulan	311,875,000	
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2,689,254,000.00	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				17,743,000,000	
	Pembangunan gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah paket pengadaan / unit	1 unit	2,013,000,000.00	Pembangunan gedung kantor	Kota Palangka Raya	Jumlah paket pengadaan / unit	1 unit	13,000,000,000	
	Pengadaan mobil jabatan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah paket pengadaan / unit	1 Unit	461,000,000.00	Pengadaan mobil operasional	Kota Palangka Raya	Jumlah paket pengadaan / unit	3 unit	900,000,000	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Unit	2 Unit	54,000,000.00	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kota Palangka Raya	Jumlah Unit	2 Unit	60,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Meubelair	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah paket pengadaan meubelair kantor	1 Paket	64,000,000.00	Pengadaan Meubelair	Kota Palangka Raya	Jumlah paket pengadaan meubelair kantor	1 Paket	3,500,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah unit pemeliharaan	1 Unit	30,000,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Palangka Raya	jumlah unit pemeliharaan	1 Unit	100,000,000	
	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah unit pemeliharaan	1 Unit	47,254,000.00	Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir	Kota Palangka Raya	jumlah unit pemeliharaan	1 Unit	98,000,000	
	Penataan Taman dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Lokasi penataan halaman dan kebun hortikultura	1 Lokasi	20,000,000.00	Penataan Taman dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura	Kota Palangka Raya	Jumlah Lokasi penataan halaman dan kebun hortikultura	1 Lokasi	85,000,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				127,775,000.00	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				127,775,000	
	Pengadaan Pakaian olahraga	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah pakaian olahraga / orang	78 Stel	53,650,000.00	Pengadaan Pakaian olahraga	Kota Palangka Raya	Jumlah pakaian olahraga / orang	78 Stel	53,650,000	
	Pengadaan pakaian dinas	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah pakaian dinas / orang	78 Stel	74,125,000.00	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kota Palangka Raya	Jumlah pakaian	78 Stel	74,125,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	beserta perlengkapannya							dinas / orang			
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				78,167,000.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				325,000,000	
	Pendidikan dan pelatihan formal	KOTA PALANGKA RAYA	Penyediaan dana pelatihan dan diklat bagi aparatur	12 Bulan	46,167,000.00	Pendidikan dan pelatihan formal	Kota Palangka Raya	Penyediaan dana pelatihan dan diklat bagi aparatur	12 Bulan	250,000,000	
	Rapat koordinasi perencanaan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan dalam 1 tahun	4 Kali	32,000,000.00	Rapat koordinasi perencanaan	Kota Palangka Raya	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi perencanaan dalam 1 tahun	4 Kali	75,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				360,265,000.00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				957,015,000	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah dokumen laporan capaian	1 Dokumen	9,204,000.00	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	Kota Palangka Raya	jumlah dokumen	1 Dokumen	9,204,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	realisasi kinerja SKPD		kinerja yang tersusun			kinerja SKPD		laporan capaian kinerja yang tersusun			
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	9,561,000.00	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	9,561,000	
	Penyusunan RKA-SKPD	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah dokumen RKA yang tersusun	2 Dokumen	18,250,000.00	Penyusunan RKA-SKPD	Kota Palangka Raya	jumlah dokumen RKA yang tersusun	2 Dokumen	45,000,000	
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Bulan	12 Bulan	130,000,000.00	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Bulan	12 Bulan	260,000,000	
	Penyusunan renja SKPD	KOTA PALANGKA RAYA	jumlah dokumen Renja PD yang tersusun	2 Dokumen	18,250,000.00	Penyusunan renja SKPD	Kota Palangka Raya	jumlah dokumen Renja PD yang tersusun	2 Dokumen	18,250,000	
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perencana	Luar Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perencana	Luar Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	
	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	175,000,000.00	Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	2 dokumen	350,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah					dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah					
	Penyusunan dokumen ARG DP3APPKB	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Penyusunan dokumen ARG DP3APPKB	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	
	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah				22,650,000.00	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah				22,650,000	
	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan aset/ barang milik daerah	12 Bulan	22,650,000.00	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan aset/ barang milik daerah	12 Bulan	22,650,000	
	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan				1,648,890,900.00	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan				11,986,149,100	
	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah rapat koordinasi	1 Kegiatan	200,000,000.00	Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah rapat koordinasi	3 Kegiatan	1,300,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Bulan	12 Bulan	0	Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Bulan	12 Bulan	8,041,149,100	
	Sosialisasi RAD PUG Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Sosialisasi RAD PUG Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	
	Sosialisasi Advokasi PUG di Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	0	Sosialisasi Advokasi PUG di Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	210,000,000	
	Rakor Pokja PUG dan Tim Teknis ARG Tingkat Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Rakor Pokja PUG dan Tim Teknis ARG Tingkat Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	
	Rakor Pokja PUG Kab./Kota se-Kalteng	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	175,000,000.00	Rakor Pokja PUG Kab./Kota se-Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	
	Sosialisasi Pembentukan Pokjatab dan Satgas PKDRT se Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	40 Orang	0	Sosialisasi Pembentukan Pokjatab dan Satgas PKDRT se Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	40 orang	50,000,000	
	Rapat Koordinasi Tim Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi	1 Dokumen	0	Rapat Koordinasi Tim Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi	1 Dokumen	150,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi	1 Dokumen	130,379,500.00	Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjatab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi	1 Dokumen	0	
	Rapat-Rapat Koordinasi Pemantapan Lembaga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Rapat-Rapat Koordinasi Pemantapan Lembaga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	90,000,000	
	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi	1 Dokumen	300,000,000.00	Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen hasil rapat koordinasi	1 Dokumen	350,000,000	
	Rakornas Forum Anak Nasional	LUAR PROVINSI	Jumlah dokumen rakornas forum anak tingkat nasional	1 Dokumen	300,000,000.00	Rakornas Forum Anak Nasional	Luar Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen rakornas forum anak tingkat nasional	1 Dokumen	350,000,000	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah dokumen monev	1 Dokumen	105,504,150.00	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen monev	1 Dokumen	250,000,000	
	Rapat Koordinasi Pokjatab Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi, Kabupaten dan Kota	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah dokumen rapat koordinasi pokjatab GSI	1 Dokumen	57,971,250.00	Rapat Koordinasi Pokjatab Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi, Kabupaten dan Kota	Kota Palangka Raya	Jumlah dokumen rapat koordinasi	1 Dokumen	150,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								pokjatap GSI			
	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen rapat koordinasi	1 Dokumen	160,036,000.00	Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen rapat koordinasi	1 Dokumen	120,000,000	
	Sosialisasi Kebijakan PUG	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Sosialisasi Kebijakan PUG	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 Orang	75,000,000	
	Sosialisasi Kebijakan ARG	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Sosialisasi Kebijakan ARG	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 Orang	75,000,000	
	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	
	Monev PUG di Daerah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen Monev	1 Dokumen	120,000,000.00	Monev PUG di Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kabupaten/Kota	14 Kab/Kota	250,000,000	
	Penyuluhan Tentang Perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000.00	Penyuluhan Tentang Perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	0	
	Pembinaan terhadap Posyandu	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Pembinaan terhadap Posyandu melalui gerakan Sayang Ibu	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	melalui gerakan Sayang Ibu										
	Rapat Forum Gugus Tugas TPPO	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Rapat Forum Gugus Tugas TPPO	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				111,199,000.00	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				725,000,000	
	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	54,199,000.00	Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	
	Bimbingan Teknis RAD PUG Bagi SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah SKPD	45 SKPD	0	Bimbingan Teknis RAD PUG Bagi SKPD	Kota Palangka Raya	Jumlah SKPD	45 SKPD	70,000,000	
	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen pemantauan dan koordinasi Jejaring Kelembagaan	1 Dokumen	57,000,000.00	Pemantapan Jejaring Kelembagaan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	
	Pembelajaran Luar Daerah Tentang RAD dan Aplikasi ARG di SKPD	Luar Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Pembelajaran Luar Daerah Tentang RAD dan Aplikasi ARG di SKPD	Luar Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	
	TOT Fasilitator ARG Provinsi (ARG)	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	20 Orang	0	TOT Fasilitator ARG Provinsi (ARG)	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	20 orang	125,000,000	
	Pelatihan ARG bagi Focal Point SKPD Provinsi	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	40 Orang	0	Pelatihan ARG bagi Focal Point SKPD Provinsi	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	40 orang	50,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelatihan Bagi Tim Teknis ARG	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	20 Orang	0	Pelatihan Bagi Tim Teknis ARG	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	20 orang	50,000,000	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				874,645,100.00	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				2,155,000,000	
	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Kegiatan	5 Kegiatan	250,000,000.00	Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	
	Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Peserta	2 Kegiatan	100,000,000.00	Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	
	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	327,384,400.00	Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	
	Sosialisasi Advokasi Layanan P2TP2A	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Peserta	100 Orang	96,925,000.00	Sosialisasi Advokasi Layanan P2TP2A	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Peserta	100 Orang	500,000,000	
	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah/Frekuensi Kegiatan Promosi	4 Kegiatan	40,335,700.00	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah/Frekuensi Kegiatan	4 Kegiatan	100,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								n Promosi			
	Pembinaan Terhadap Posyandu Melalui Penguatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Kegiatan pembinaan	1 Kegiatan	60,000,000.00	Pembinaan Terhadap Posyandu Melalui Penguatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Kegiatan pembinaan	1 Kegiatan	300,000,000	
	Pemilihan Putra dan Putri Duta Gender Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	0	Pemilihan Putra dan Putri Duta Gender Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	150,000,000	
	Pengembangan Forum Kerja Perlindungan Perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Pengembangan Forum Kerja Perlindungan Perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	
	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Layanan Terpadu Korban Kekerasan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	30 Orang	0	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Layanan Terpadu Korban Kekerasan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	30 orang	250,000,000	
	Pelatihan Satgas PKDRT	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	60 Orang	0	Pelatihan Satgas PKDRT	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	60 orang	150,000,000	
	Sosialisasi dan Advokasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Sosialisasi dan Advokasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 orang	50,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan <i>Trafficking</i>	Kota Palangka Raya	Jumah Peserta	50 Orang	0	Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan <i>Trafficking</i>	Kota Palangka Raya	Jumah Peserta	50 orang	50,000,000	
	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan anak di Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Monitoring dan Evaluasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan anak di Daerah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Tindak kekerasan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Fasilitasi dan Koordinasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Tindak kekerasan	Kota Palangka Raya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	
	Sosialisasi Perlindungan Perempuan Berkebutuhan Khusus dalam Keadaan Darurat	Kota Palangka Raya	Jumah Peserta	50 Orang	0	Sosialisasi Perlindungan Perempuan Berkebutuhan Khusus dalam Keadaan Darurat	Kota Palangka Raya	Jumah Peserta	50 orang	50,000,000	
	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kota Palangka Raya	Jumlah/Frekuensi Kegiatan Promosi	4 Kegiatan	0	Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Kota Palangka Raya	Jumlah/Frekuensi Kegiatan Promosi	4 Kegiatan	50,000,000	
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender				475,000,000.00	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender				3,195,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	dalam pembangunan					dalam pembangunan					
	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	230,000,000.00	Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kegiatan	2 Kegiatan	260,000,000	
	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen promosi	1 Dokumen	150,000,000.00	Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Promosi	2 Promosi	300,000,000	
	Pembentukan Kaukus Perempuan Provinsi Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kaukus	1 Kaukus	0	Pembentukan Kaukus Perempuan Provinsi Kalteng	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Kaukus	1 Kaukus	100,000,000	
	Capacity Building Bagi Perempuan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Peserta	50 Orang	50,000,000.00	Capacity Building Bagi Perempuan	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	
	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Peserta	30 Orang	45,000,000.00	Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Peserta	30 Orang	0	
	Pelatihan keterampilan Dalam rangka Peningkatan ekonomi keluarga untuk menuju keluarga yang berkualitas	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Pelatihan keterampilan Dalam rangka Peningkatan ekonomi keluarga untuk menuju keluarga yang berkualitas	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	50 orang	250,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi Bagi Perempuan Pelaku Usaha di Bidang Industri Rumahan	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi Bagi Perempuan Pelaku Usaha di Bidang Industri Rumahan	Kota Palangka Raya	Jumlah Peserta	50 orang	100,000,000	
	Pelatihan Pembekalan Anggota Legislatif (ALEG) Perempuan Terpilih Pemilu 2019	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	80 Orang	0	Pelatihan Pembekalan Anggota Legislatif (ALEG) Perempuan Terpilih Pemilu 2019	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	80 Orang	250,000,000	
	Pembinaan Kelompok Perempuan Dalam Bentuk UKM	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Pembinaan Kelompok Perempuan Dalam Bentuk UKM	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	50 orang	250,000,000	
	Sosialisasi/Advokasi pemetaan lembaga/organisasi Masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Orang	0	Sosialisasi/Advokasi pemetaan lembaga/organisasi Masyarakat	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	
	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak				436,654,000.00	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak				680,000,000	
	Seminar dan Penyuluhan tentang Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	157,000,000.00	Seminar dan Penyuluhan tentang Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	
	Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	PROVINSI KALIMANTAN	Jumlah Dokumen Monev	1 Dokumen	50,000,000.00	Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen Monev	1 Dokumen	80,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TAN TENGAH									
	Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	229,654,000.00	Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	
	Sosialisasi/Advokasi pencegahan perkawinan Anak	Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Sosialisasi/Advokasi pencegahan perkawinan Anak	Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	
	Sosialisasi Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kabupaten	Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	0	Sosialisasi Perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di Kabupaten	Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	
	Program Penyusunan Profil Lembaga				369,643,000.00	Program Penyusunan Profil Lembaga				1,095,000,000	
	Surveilans Data Terpilah Gender dan Anak Bagi Anggota Forum Data Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	1 Dokumen	0	Surveilans Data Terpilah Gender dan Anak Bagi Anggota Forum Data Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	
	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Aplikasi	2 Aplikasi	31,549,700.00	Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Aplikasi	2 Aplikasi	75,000,000	
	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	113,093,300.00	Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	Kota Palangka Raya	Buku/Dokumen	1 Dokumen	175,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Buku Panduan Penyusunan data Terpilah Gender Dan Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Buku/Dokumen	1 Dokumen	0	Penyusunan Buku Panduan Penyusunan data Terpilah Gender Dan Anak	Provinsi Kalimantan Tengah	Buku/Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	
	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah bulan	12 Bulan	100,000,000.00	Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Kota Palangka Raya	Jumlah bulan	12 Bulan	175,000,000	
	Sosialisasi Hasil Penyusunan Data Terpilah Gender Dan Anak	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	26 Orang	0	Sosialisasi Hasil Penyusunan Data Terpilah Gender Dan Anak	Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta	26 Orang	150,000,000	
	Pengembangan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	Kota Palangka Raya	Jumlah Bulan	12 Bulan	125,000,000.00	Pengembangan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	Kota Palangka Raya	Jumlah Bulan	12 Bulan	150,000,000	
	Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA)	Kota Palangka Raya	Jumlah Forum	1 Forum	0	Sosialisasi dan Advokasi Pembentukan Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA)	Kota Palangka Raya	Jumlah Forum	1 Forum	260,000,000	
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				2,683,000,000	
	Program Keluarga Berencana				518,765,500.00	Program Keluarga Berencana				2,033,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan KIE	KABUPATEN KATINGAN	Jumlah Dokumen pelaksanaan KIE	1 Dokumen	75,000,000.00	Pelayanan KIE	Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen pelaksanaan KIE	120 orang	125,000,000	
	Promosi Keikutsertaan Ber-KB pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	120 Orang	0	Promosi Keikutsertaan Ber-KB pada Pasangan Usia Subur (PUS)	Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta	120 orang	125,000,000	
	Promosi Kepedulian KB	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Peserta	30 Orang	64,200,000.00	Promosi Kepedulian KB	Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta	100 orang	100,000,000	
	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	KABUPATEN GUNUNG MAS	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	55,365,500.00	Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se Kalimantan Tengah	Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta	200 orang	200,000,000	
	Bimbingan Teknis Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	60 Orang	0	Bimbingan Teknis Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	60 orang	120,000,000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian penduduk Kalimantan Tengah	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan	0	Pemetaan Perkiraan Pengendalian penduduk Kalimantan Tengah	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan	1 Dokumen	150,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sosialisasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	100 Orang	0	Sosialisasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Kab/Kota	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	100 orang	100,000,000	
	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	35,000,000.00	Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	
	Bimbing Teknis Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	40 Orang	0	Bimbing Teknis Sinkronisasi Kebijakan dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	40 orang	90,000,000	
	Peningkatan Jejaring Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	41 Orang	0	Peningkatan Jejaring Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	41 orang	90,000,000	
	Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	KOTA PALANGKA RAYA	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75,000,000.00	Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000.00	Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	175,000,000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Ormas dalam pemabangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Ormas dalam pemabangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta	50 Orang	100,000,000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Ormas dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta	40 Orang	0	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Ormas dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta	40 Orang	75,000,000	
	Promosi dan Kampanye tentang Delapan Fungsi Keluarga di Kampung KB	Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta	40 Orang	0	Promosi dan Kampanye tentang Delapan Fungsi Keluarga di Kampung KB	Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta	40 Orang	75,000,000	
	Pembinaan Ketahanan Keluarga pada	LUAR PROVINSI	Jumlah Peserta	30 Orang	64,200,000.00	Pembinaan Ketahanan Keluarga pada Kegiatan	Pusat/Provinsi/Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta	50 Orang	200,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kegiatan Momentum Keluarga Berencana					Momentum Keluarga Berencana					
	Pertemuan Koordinasi dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Pertemuan Koordinasi dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	50 Orang	75,000,000	
	Kerjasama kemitraan dengan Ormas dalam Pemberdayaan Keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	50 Orang	0	Kerjasama kemitraan dengan Ormas dalam Pemberdayaan Keluarga	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	50 Orang	83,000,000	
	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS				168,416,500.00	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS				300,000,000	
	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Jumlah Peserta	400 Orang	168,416,500.00	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta	300 Orang	300,000,000	
	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas				0	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas				350,000,000	
	Peningkatan Kualitas SDM	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta	100 Orang	0	Peningkatan Kualitas SDM	Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta	100 orang	100,000,000	

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	Prog / Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu	
					(Rp. 000)					(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rapat Koordinasi Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	100 Orang	0	Rapat Koordinasi Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah Peserta	100 orang	250,000,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

forum OPD sebagai sarana dua arah atau wadah organisasi dalam memberikan ruang bagi masyarakat, stakeholders, lembaga dinas/ instansi terkait dalam berdiskusi dan bermusyawarah untuk menyusun dan merencanakan program kerja pembangun untuk tahun 2022. Sebagai OPD yang menangani dan terkait terhadap isu-isu strategis pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, Rancangan rencana kerja DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didiskusikan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.

Pada forum OPD terdapat usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan-usulan tersebut disajikan pada **tabel 2.6** :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan tahun 2022
Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Sumber Usulan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.08.03.1.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 2.08.03.1.03.04 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen	1	KOMISI III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah	Terlaksananya program dan kegiatan Forum PUSPA untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak
2	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 2.08.04.1.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.08.04.1.03.01 - Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Kegiatan	1	Kabupaten Gunung Mas	Peningkatan Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan Dan Anak (PUSPA)

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Sumber Usulan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2.08.06.1.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 2.08.06.1.01.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Kabupaten Barito Selatan	Jumlah Kegiatan	1	Kabupaten Barito Selatan	Pengembangan Kota Layak Anak
4	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 2.08.06.1.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 2.08.06.1.02.04 - Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kotawaringin Barat	Jumlah Kegiatan	1	Kabupaten Kotawaringin Barat	Sosialisasi / pembentukan kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
5	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.08.07.1.01.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kabupaten Gunung Mas	Jumlah Kegiatan	1	Kabupaten Gunung Mas	Penyuluhan tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak
6	Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Kabupaten Seruyan	Jumlah Kegiatan	1	Kabupaten Seruyan	Sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap kekerasan anak

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Sumber Usulan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	<p>2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</p> <p>2.08.07.1.01 - Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2.08.07.1.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi</p>	Kabupaten Kotawaringin Barat	Jumlah Kegiatan	1	Kabupaten Kotawaringin Barat	Sosialisasi kabupaten layak anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
8	<p>2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</p> <p>2.14.02.1.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</p> <p>2.14.02.1.01.02 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi</p>	Kabupaten Seruyan	Jumlah Kegiatan	1	Kabupaten Seruyan	Sosialisasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) lima pilar Tingkat Kabupaten/Kota
9	<p>2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</p> <p>2.14.02.1.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</p> <p>2.14.02.1.01.02 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi</p>	Kabupaten Lamandau	Jumlah Kegiatan	1	Kabupaten Lamandau	Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Kabupaten Lamandau

No.	Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Sumber Usulan	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	<p>2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</p> <p>2.14.03.1.02 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</p> <p>2.14.03.1.02.03 - Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK</p>	Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen	1	KOMISI III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memelopori gerakan Keluarga Berencana di Indonesia, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Kalimantan Tengah dapat mengembangkan strategi peran serta dalam Promosi Kesehatan Ibu dan Anak, Promosi Pencegahan Pernikahan Anak dan Stunting, Promosi Pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan Kekerasan, dan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Mikro.</p>

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Kementerian PPPA

Kementerian PPPA merupakan bagian dari Kabinet Kerja periode 2019–2024 yang akan melaksanakan agenda kerjanya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019–2024. RPJMN merupakan himpunan dari aspirasi rakyat dan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden RI yang telah dijanjikan pada masa kampanye Pemilu Presiden RI pada tahun 2019.

Visi Kementerian PPPA

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu: "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong". Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan) misi, yaitu sebagai berikut:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu: "Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekuil, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Misi Kementerian PPPA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun 2020-2024 disusun

dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
2. peningkatan perlindungan anak; dan
3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan adalah penjabaran visi kementerian yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (Bappenas, 2014). Perumusan tujuan Kemen PPPA didasarkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat peraturan perundang-undangan terkait.

Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1. ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu "Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing", khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu "Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda", Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu "Pemenuhan hak dan perlindungan anak", dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu "perlindungan perempuan". Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai yaitu:

1. Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
5. Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan presiden, yaitu:

1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan Anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak.



Gambar 2.1 Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA

Dimana Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

No	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
3.	TPAK Perempuan
4.	Indeks PUG Nasional
5.	Indek Perlindungan Anak (IPA)
6.	Proporsi Perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun
7.	Jumlah Kabupaten/Kota dengan peringkat menuju KLA
8.	Prosentasi balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak
9.	Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat
10.	Indeks Kualitas Keluarga
11.	Prevalensi Perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komperenhensip (SPHPN dan Simponi)
12.	Persentase pemula yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar
13.	Prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (SNPHAR 2018)
14.	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan Komperensif (SNPHAR dan Simponi)
15.	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja
16.	Indek Reformasi Birokrasi
17.	Opini BPK atas Laporan Keuangan
18.	Tingkat Maturitas SPIP
19.	Nilai SAKIP

Sasaran Strategis Kementerian PPPA

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas

Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator

Kinerja Sasaran Strategis. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu 2. Persentase Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan

TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapat Layanan Komprehensif.

5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif.

6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
- d. Nilai SAKIP.

3.1.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Agenda pembangunan nasional selama 20 tahun telah di tuangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang merupakan acuan, arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan dari pembangunan sebelumnya. Saat ini Indonesia memasuki periode terakhir RPJMN IV tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Lebih lanjut sebagaimana tertera dalam Lampiran I Peraturan

Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi.

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, Visi Misi dan 5 (lima) arahan utama Presiden menjadi landasan utama RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan (Prioritas Nasional/PN). Dalam hal ini, BKKBN diberi mandat untuk turut berkontribusi secara langsung pada PN "Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdayasaing", dan PN "Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan", dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Prioritas Nasional (PN) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdayasaing;
 - 1) Program Prioritas (PP) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, dengan KP; 1) Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan 2) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk.
 - 2) PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, dengan KP; Kesejahteraan Sosial.
 - 3) PP Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan KP;
 - 1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, dan 2) Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat.

Dari Program Prioritas tersebut, BKKBN memiliki kontribusi terhadap KP Peningkatan Kesehatan Ibu Anak, KB dan Kesehatan Reproduksi, dengan fokus strategi untuk:

- a). peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi;
- b). perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah;
- c). peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi bagi remaja dan praremaja yang responsif

gender;

- d). peningkatan kompetensi PKB/PLKB;
 - e). penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi khususnya praktik mandiri bidan, dokter swasta dan organisasi profesi; dan
 - f). penguatan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Program Bangga Kencana serta konseling KB dan Kesehatan Reproduksi secara komprehensif.
- b. Prioritas Nasional (PN) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan: PP Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan KP Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter sejak usia dini. Dari KP tersebut, BKKBN berkontribusi melalui beberapa fokus strategi, diantaranya:
- 1) Peningkatan pemahaman peran keluarga yang memiliki anak remaja dalam pengasuhan dan pembentukan karakter remaja.
 - 2) Peningkatan penyampaian informasi dan edukasi pada remaja dalam pembentukan karakter.
 - 3) Peningkatan pemahaman keluarga dalam pola pengasuhan dan pendampingan anak sejak usia dini.
 - 4) Penguatan pemberdayaan ekonomi keluarga guna meningkatkan kualitas keluarga.

Arah kebijakan dan strategi BKKBN secara umum mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024, terutama dalam menerjemahkan Prioritas Nasional melalui Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) yang menjadi arahan Presiden RI sebagai fokus penggarapan Pembangunan Nasional Indonesia periode 2020-2024. Adapun arah kebijakan dan strategi BKKBN adalah sebagai berikut:

- c. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
 - 1) Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
 - 2) Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.

- 3) Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluargabagi remaja.
 - 4) Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB Mandiri di wilayah Kampung KB.
 - 5) Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
 - 6) Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
 - 7) Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- d. menguatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
- 1) Pengembangan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
 - 2) Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
 - 3) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
 - 4) Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
- e. meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
- 1) Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
 - 2) Penguatan kemitraan kualitas pelayanan KBKR.
 - 3) Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
 - 4) Peningkatan KB Pria.
 - 5) Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
 - 6) Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- f. meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

- 1) Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
 - 2) Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub PPKBD.
- g. memperkuat system informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- 1) Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan Wilayah.
 - 2) Pengembangan Smart Technology/Smart Program untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Berbagai arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana tersebut diatas tentunya memerlukan dukungan untuk membantu agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, diantaranya:

1. Dari sisi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana, arah kebijakan yang diambil diantaranya untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi, serta Penguatan Kerjasama Global Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
 - a. peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi;
 - b. peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Program Bangga Kencana sebagai *input*/masukan atas rumusan kebijakan;
 - c. peningkatan kemitraan dan kerjasama global di bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan untuk memperkuat kelembagaan.
2. Dari sisi Dukungan Manajemen, Sekretariat Utama memiliki arah kebijakan untuk dukungan manajemen yang berkualitas dalam mendukung Penyelenggaraan Program Bangga Kencana, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
 - a. penyediaan dan sinkronisasi landasan hukum Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tatalaksana;
 - b. peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN;
 - c. penguatan Perencanaan Program dan Anggaran;
 - d. peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur; dan
 - e. penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan keru

mah-tangga yang berkualitas.

3. Dari sisi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas, Inspektorat Utama memiliki arah kebijakan untuk meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang akan diwujudkan melalui strategi:
 - a. mendorong pengelolaan keuangan BKKBN secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, dan efektif;
 - b. mendorong pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Reformasi Birokrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi;
 - c. mendorong seluruh kebijakan yang ditetapkan Kepala BKKBN dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Unit Kerja Eselon I dan Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
 - d. mendorong pencapaian sasaran strategis BKKBN secara efektif dan efisien.

Dalam menjabarkan arah kebijakan dan strategi BKKBN sebagaimana terteradiatas, terutama dalam implemetasinya, BKKBN akan terus memperhatikan perkembangan situasi/kondisi dan isu strategis nasional serta prioritas strategi pembangunan nasional. Salah satu strategi pembangunan nasional yang perlu mendapat perhatian adalah Pengarusutamaan Gender yang telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan isu lintas sektor yang tanggung jawab implementasinya harus didukung baik oleh Pemerintah Pusat (lintas K/L) maupun oleh Pemerintah Daerah. BKKBN berkomitmen untuk memastikan setiap orang (laki-laki dan perempuan) mendapatkan hak yang sama dalam pelayanan Program Bangga Kencana serta memperhatikan konsep Pegarusutamaan Gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Program/Kegiatan Bangga Kencana yang inklusif gender.

Urusan Pemerintahan Konkuren Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 Terkait Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan konkuren atau urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Berdasarkan pasal 12 ayat 2 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk kedalam urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dimana pembagian pembagian urusan pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Kualitas Hidup Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat nasional - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat nasional - Standardisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten /kota - Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan tingkat Daerah kabupaten /kota
2.	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup nasional - Penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional - Standardisasi lembaga penyedia layanan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Provinsi dan lintas Daerah Kabupaten / kota - Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		perlindungan perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten /kota
3.	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional. - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak tingkat nasional - Standardisasi lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota - Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota
4.	Sistem Data Gender dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan sistem data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat nasional - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota

NO .	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		kelembagaan data di tingkat nasional		
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat nasional	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi	- Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah Kabupaten /kota

Tabel 3.3
Pembagian Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.	Pengendalian Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk - Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk - Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota
2.	Keluarga Berencana (KB)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan desain program dan pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pengendalian penduduk - Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) - Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional. - Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal - Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB). - Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN / KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam - pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB 		<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB
3.	Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga - Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4.	Standarisasi dan Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB) 	-----	-----

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja PD Tahun 2022 PD

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih untuk periode 2022 – 2026 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagaimana pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusun rencana strategis SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 – 2026 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2022 – 2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mengacu pada RPJMD Tahun 2022 – 2026, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara ringkas Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Visi

” Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah”.

Sejalan dengan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan
2. Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh DP3APPKB pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022-2026 dirumuskan sebagai berikut :

- Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
- Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
- Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak
- Tujuan 4 Meningkatkan kualitas data gender dan anak
- Tujuan5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Tujuan 6 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

- Tujuan 1 Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan*
Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah “*Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender*” yang ditandai dengan:
- a. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
 - b. Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga
 - c. Persentase perempuan di lembaga legislatif
 - d. Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
- Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan*
Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah “*Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO*” yang ditandai dengan:
- a. Rasio kekerasan terhadap perempuan da TPPO
“*Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO*” yang ditandai dengan:
 - a. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
- Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak*
Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu: “*Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak*” yang ditandai dengan:
- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
 - b. Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
 - b. Rasio anak korban kekerasan
“*Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak*”
yang ditandai dengan:
 - a. Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif
- Tujuan 4 Meningkatkan kualitas data gender dan anak*
Untuk mencapai tujuan di atas sasaran strategisnya yaitu: “*Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak*” yang ditandai dengan:
- a. Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak

Tujuan 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:
“Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran”

yang ditandai dengan:

a. Hasil Penilaian SAKIP

Tujuan 6 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah dengan

:

“Menurunnya angka kelahiran, Ketahanan Keluarga dan Stunting ”

yang ditandai dengan:

a. Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate (TFR)*

b. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ modern Contraceptive (mPCR)

c. Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)

d. Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (*Age Specific Fertility Rate / ASFR*)

e. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka pada tahun 2022 disusun program dan kegiatan dengan berpedoman pada Nomenkalur Permendagri 90 Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan
- b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- d) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- b) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d) Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sun Kegiatan :

- a) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- e) Fasilitas Kunjungan Tamu
- f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b) Pengadaan Mebel
- c) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- d) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
- c) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
- b) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- b) Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
- b) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

- b) Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi Penguatan Jejaring antar Lembaga

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Kegiatan : Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data

Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
- b) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi

6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan : Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

- b) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan : Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi

Kegiatan :

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Kegiatan : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan :

- a) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
- b) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
- c) Advokasi dan Sosialisasi GDPK

2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Kegiatan : Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan :

- a) Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal

Kegiatan : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Sub Kegiatan :

- a) Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Kegiatan : Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- b) Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- c) Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
- d) Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK

Secara rinci Rumusan Rencana Program dan Kegiatan rencana kerja tahun 2022 memuat indikator kinerja *outcome/output* masing-masing Program/kegiatan pada DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dalam **tabel 4.1** sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Tengah

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			22.814.322.70 9,00		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			20.739.322.70 9,00		
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik (Persen)	100	14.560.856.68 9,00		
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Pelaporan Program/Kegiatan dan Anggaran (Persen)	100	349.911.800,0 0	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja SKPD (Dokumen)	1	35.600.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
2.08.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya RKA SKPD (Dokumen)	2	29.311.800,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan realisasi SKPD (Dokumen)	1	85.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja PD (Dokumen)	1	200.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani (Persen)	100	7.801.115.889,00	(KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN (Tahun)	1	7.727.615.889,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
2.08.01.1.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan (Dokumen)	1	8.500.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan bulanan dan triwulan (Dokumen)	2	65.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Pengelolaan Aset/Barang Daerah (Dokumen)	1	17.600.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.03. 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan penyediaan (bulan)	12	17.600.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur yang memenuhi standar kompetensi (Persen)	100	150.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah bulan penyediaan (Bulan)	12.00	150.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani (Persen)	100	1.603.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor DP3APPKB (persen)	100	85.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya ATK serta peralatan dan perlengkapan kantor Dinas P3APPKB (Tahun)	1.00	100.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan (Tahun)	1	50.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Tahun)	1	53.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya fasilitas kunjungan tamu (Bulan)	12.00	45.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas P3APPKB (Tahun)	1	1.150.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Keterbukaan Informasi Publik Dinas P3APPKB (Tahun)	1	120.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana kantor DP3APPKB Provinsi Kalteng (Tahun)	1	1.447.325.500,00	(KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional Dinas P3APPKB (Persen)	100	650.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil
2.08.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor (Persen)	100.00	120.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
2.08.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya aset pendukung kegiatan kantor Dinas P3APPKB (Persen)	100	177.325.500,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana (Parkir) Gedung Kantor Dinas P3APPKB (Persen)	100	500.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja Internal yang Terlayani (Persen)	100	1.499.903.500,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Kegiatan Persuratan Kantor Dinas P3APPKB (Tahun)	1.00	27.500.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Tahun)	1.00	134.989.500,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan (Bulan)	12	1.337.414.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang terpelihara (Persen)	100	1.692.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
2.08.01.1.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan dinas jabatan (Tahun)	1.00	75.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya dan terbayarnya pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan (Tahun)	1	50.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpelihara Peralatan dan Mesin Kantor (Tahun)	1.00	32.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Tahun)	1	1.520.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.01.1.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Tahun)	1	15.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Pelembagaan PUG pada Lembaga Pemerintah termasuk PPRG (Persen)	100	1.950.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan (Dokumen)	3	330.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Persentase Pelaksanaan Kebijakan PUG di Kab./Kota (Persen)	100	150.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	80.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Persentase Pelaksanaan Kebijakan PUG di Kab./Kota (Persen)	100	100.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			1.470.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi (Persen)	100	1.230.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi (Persen)	100	240.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Persentase Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Persen)	100	150.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
2.08.02.1.03. 02	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	70.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.02.1.03. 02	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Persentase Penurunan Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Persen)	100	80.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan (Persen)	100	1.662.653.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan tindak kekerasan terhadap anak atau laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu (persen)	100	875.000.000,00	(-, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.03.1.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya dokumen pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (Dokumen)	1	75.000.000,00	(-, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.03.1.01. 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Terusunnya dokumen pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan	1	800.000.000,00	(-, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
		Perlindungan Perempuan (Dokumen)				
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan (Dokumen)	1	580.000.000,0 0	(-, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Bulan)	12	430.000.000,0 0	(-, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya dokumen pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan (Dokumen)	1	150.000.000,0 0	(-, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (Dokumen)	1	207.653.000,0 0	(-, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
						Fisik, PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.03.1.03. 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Dokumen Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	182.653.000,0 0	(1)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus -

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
						Dana Alokasi Khusus Non Fisik, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.03.1.03.02	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Dokumen Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	25.000.000,00	(-, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan (Persen)	100	295.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Peningkatan Persentase Kelompok Usaha Perempuan (Persen)	100	100.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.04.1.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Tersusunnya dokumen pelaksanaan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga (Dokumen)	1	100.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.04.1.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Partisipasi dan Promosi Layanan Pemberdayaan Perempuan dan	100	195.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
		Perlindungan Anak (Persen)				
2.08.04.1.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.00	195.000.000,0 0	(-, KALIMANTA N TENGAH)	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen Data Terpilah Gender yang tersusun (Dokumen)	1	555.000.000,0 0		PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			555.000.000,0 0		PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak (Persen)	100	120.000.000,0 0	(KALIMANT AN TENGAH)	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak (Persen)	100	435.000.000,0 0	(KALIMANT AN TENGAH)	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Anak melalui KLA (Persen)	100	861.398.020,0 0		PENDAPATA N ASLI

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
						DAERAH (PAD)
2.08.06.1.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (persen)	100	411.398.020,00	(14 Kab/Kota, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak (Kegiatan) Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak (Kegiatan) Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1 1 1	325.000.000,00	(-, KAB. BARITO SELATAN) (-, KAB. KOTAWARINGIN BARAT) (Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	86.398.020,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas FAD Provinsi Kalteng (Persen)	100	450.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
2.08.06.1.02. 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Tesusunnya dokumen pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)	1	-	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.06.1.02. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak (Dokumen)	1	300.000.000,0 0	(Luar Kalimantan Tengah, Luar Wilayah)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.06.1.02. 01	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen pelaksanaan kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) Sosialisasi / pembentukan kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (Kegiatan)	1.00 2	150.000.000,0 0	(KALIMANTAN TENGAH) (-, KAB. KOTAWARINGIN BARAT)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari Tindak Kekerasan (Persen)	100	854.415.000,0 0		
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup	Persentase Peningkatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan	100	477.750.000,0 0	(14 Kab/Kota, KALIMANTAN	Dana Transfer Khusus -

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
	Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (persen)			AN TENGAH)	Dana Alokasi Khusus Non Fisik, PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.07.1.01. 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Tersusunnya dokumen pelaksanaan kegiatan Sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan terhadap kekerasan anak (Kegiatan) Tersusunnya Dokumen Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen) Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan tentang Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (Kali)	1 1 1	325.000.000,0 0	(KAB. SERUYAN) (KALIMANT AN TENGAH) (KAB. GUNUNG MAS)	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
2.08.07.1.01. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	<p>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi (Dokumen)</p> <p>Jumlah pengaduan tindak kekerasan terhadap anak atau laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu (persen)</p>	1 100	152.750.000,0 0	<p>(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)</p> <p>(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)</p>	<p>Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</p>
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan (Persen)	100	376.665.000,0 0	(KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
2.08.07.1.02. 01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (Dokumen)	1	150.000.000,0 0	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.08.07.1.02. 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah pengaduan tindak kekerasan terhadap anak atau laporan yang ditindaklanjuti oleh Unit Pelayanan Terpadu (Persen)	100	226.665.000,0 0	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2.075.000.000,00		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Berencana (Persen)	100	350.000.000,00		
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya Persentase Pelaksanaan Program KB dan KS (Persen)	100	350.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.02.1.01. 01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Terusunnya Dokumen Hasil Koordinasi/Konsultasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) (Dokumen)	1	75.000.000,00	(14 Kab/Kota, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
2.14.02.1.01. 02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Tersusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Seruyan (Dokumen) Tersusunnya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi (Dokumen) Tersusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Lamandau (Dokumen)	1 1 1	175.000.000,0 0	(-, KAB. SERUYAN) (Seruyan, KALIMANTAN TENGAH) (-, KAB. LAMANDAU)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.02.1.01. 03	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Terlaksananya kegiatan Advokasi dan Sosialisasi GDPK (Dokumen)	1	100.000.000,0 0	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Peningkatan Pasangan Usia Subur ber-KB (Persen)	100	325.000.000,0 0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh peningkatan pengetahuan melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi Ketahanan Keluarga dan Pencegahan Stunting (Persen)	100	75.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
2.14.03.1.01. 02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dokumen)	1	75.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya Peran serta Ormas Tingkat Daerah dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (Persen)	100	250.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.03.1.02. 03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK	Terlaksananya Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dan Program KKBPK (Dokumen)	1	250.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Keluarga Sejahtera (Persen)	100	1.400.000.000,00		
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di daerah (Persen)	100	1.400.000.000,00	(KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TAR GET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA
2	3	4	8	9	10	11
2.14.04.1.01.01	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersusunnya dokumen Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	85.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.04.1.01.03	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersusunnya dokumen pelaksanaan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	1	80.000.000,00	(-, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.04.1.01.05	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Tersusunnya dokumen pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja (Dokumen)	1	75.000.000,00	(-, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.14.04.1.01.14	Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Terlaksananya Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK (Kegiatan)	1	1.160.000.000,00	(Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
J U M L A H				22.814.322.709,00		

-

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (Stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*Trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar benar dikedepankan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah disusun dalam rangka perwujudan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang.

DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi Keluaran berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUHA) di semua Perangkat daerah (PD) dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat.

Agar setiap PD dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PUHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas akhir yang paling mendasar dari DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah adalah mengubah mindset individu dan budaya lembaga dari buta dan bias gender menjadi sadar, sensitif, peduli, dan tanggap (responsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli anak.

Oleh karena itu, indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari capaian layanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah membutuhkan usaha dan komitmen dari seluruh stakeholder, mengingat jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Selain itu, melihat visi dan misinya, maka keberhasilan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatannya.

Palangka Raya, 19 Agustus 2021

PLT. KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



dr. LINAE VICTORIA ADEN, M. M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 19680717 199903 2 006